



**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jusmer Sihotang

Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi, Jl Sutomo No. 4 Medan
jusersihotang@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the influence of economic growth rate, Human Development Index (HDI), open unemployment rate, and inflation rate to the number of people under poverty line in Province of North Sumatera. This research employs multiple linier regression with Ordinary Least Square (OLS) by using secondary time series data from 2001-2015.

The OLS result shown that all independent variables can properly and simultaneously significant in explaining the number of people under poverty line in Province of North Sumatera which is indicated by the high of coefficient of determination (R^2) and F-statistic. However, individually, only HDI and open unemployment rate that significantly influenced to the number of people under poverty line in Province of North Sumatera. This study indicated that the increased of human development index and decreased of open unemployment rate will be decreasing of number of people in poverty in Province of North Sumatera, vise versa.

The policy implications that can be recommended to decrease the number of people under poverty line are to increase the HDI, through improvement of life

expectancy index, education index, and income index. The decline of people under poverty line can also done by decreasing the level of open unemployment rate through policies that can expand employment opportunities and promote employment programs.

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim : 31 Juli 2019
Revisi Pertama :
Diterima : 27 September 2019
Tersedia online : 30 September 2019

Kata Kunci : *the number of people under poverty line, economic growth rate, Human Development Index (HDI), open unemployment rate, inflation rate*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan ekonomi tradisional, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menimbulkan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lainnya, menciptakan distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Harapan yang demikian menyebabkan bahwa pembangunan yang terjadi pada banyak negara berkembang, lebih menitikberatkan pada pertumbuhan yang tinggi dan mengesampingkan pemerataan. Ketimpangan akibat ketidakmerataan pendapatan pada akhirnya telah menciptakan kemiskinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pandangan ekonomi baru dinyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan semata tetapi juga untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan nasional harus mampu mengangkat kehidupan manusia yang berada pada tingkatan paling bawah (penduduk miskin) ke tingkatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Hal ini penting sebab semakin besar jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Suatu pembangunan dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin dapat diminimalkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 sampai dengan September 2016, ternyata jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia walaupun sedikit berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 38,74 juta orang (19,14 persen) pada tahun 2000, turun menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) pada tahun 2010. Bahkan jumlah dan persentase tersebut menurun menjadi 28,59 juta orang (11,66 persen) pada September 2012 dan kemudian menurun terus menjadi 27,76 juta orang (10,7 persen) pada September 2016. Selama kurun waktu tersebut tercatat hanya terjadi dua kali peningkatan yang relatif tinggi jumlah penduduk miskin di Indonesia, yaitu naik dari 37,90 juta orang pada tahun 2001 menjadi 38,39 juta orang pada tahun 2002, kemudian naik dari 35, 10 juta orang pada tahun 2005 menjadi 39,08 juta orang pada tahun 2006.

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi yang tinggi persentase penduduk miskinnya. Data BPS pada bulan September 2014, menunjukkan bahwa penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara adalah 9,85 persen mencapai peringkat ke-17 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Peringkat pertama yang paling tinggi penduduk miskinnya adalah provinsi Papua (27,80 persen), dan peringkat terendah yang paling sedikit penduduk miskinnya adalah DKI Jakarta (4,09 persen). Untuk 10 provinsi yang terdapat di wilayah Sumatera, data BPS pada bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk miskin terkecil yaitu 69,22 ribu jiwa, sementara Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 1.339,16 ribu jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara walaupun sedikit berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 1.840,2 juta orang pada tahun 2005, turun menjadi 1.490,9 juta orang pada tahun 2010. Namun jumlah tersebut naik menjadi 1.508,1 juta orang pada September 2015 dan kemudian turun menjadi

1.451,6 juta orang pada September 2016. Akan tetapi persentase penduduk miskin di Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 14,68 persen pada tahun 2005 menjadi 11,31 persen pada tahun 2010, kemudian turun lagi menjadi 10,8 persen pada September 2015, dan hanya sebesar 10,3 persen pada September 2016. Selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2016, persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara hanya dua kali mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2006 meningkat 0,98 persen dibandingkan dengan tahun 2005, kemudian pada September 2015 meningkat 0,94 persen dibandingkan dengan September 2014.

Dalam dokumen Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, disimpulkan ada empat butir penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu (i) mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan, (ii) memperkuat kemampuan sumber daya manusia, dan (iii) mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin, dan (iv) memperkuat kerangka kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan publik lebih memihak masyarakat miskin (The World Bank, 2006).

Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan, dan merupakan determinan utama dalam mengurangi kemiskinan, dengan alasan: (1) langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan, baik dalam konteks perdesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau, (2) dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan. Akan tetapi, supaya penduduk miskin dapat memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi, maka perlu memelihara stabilitas makroekonomi, misalnya dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil dan kompetitif. Negara-negara yang mengalami guncangan (*shock*) makroekonomi pada umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang lebih lamban dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki pengelolaan makroekonomi yang lebih baik.

Kemampuan sumberdaya manusia harus diperkuat dengan semakin meningkatkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin baik oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: (1) banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan, (2) banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga, dan (3) beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara

yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Nilai IPM yang tinggi yang menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dalam hal kesehatan, pendidikan, dan daya beli pada gilirannya akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah atau negara.

Kebijakan makroekonomi yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi pada suatu negara diduga kuat akan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Penurunan tingkat pengangguran akan menaikkan pendapatan perkapita penduduk sehingga dapat meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Inflasi yang rendah akan menambah kemampuan daya beli pendapatan penduduk dalam memperoleh barang dan jasa. Penambahan konsumsi barang dan jasa akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Untuk merumuskan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan, penulis tertarik menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana dan seberapa besarkah pengaruh variabel-variabel ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara ?

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pandangan ekonomi baru menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2003). Menurut Kartasmita dalam Rahmawati (2006), kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat faktor. Pertama, rendahnya taraf pendidikan yang membuat kemampuan pengembangan diri terbatas dan hal ini akan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi yang menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja sehingga sulit memutuskan lingkaran kemiskinan. Keempat, kondisi keterpencilan dan keterisolasian sehingga sulit atau tidak terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi miskin karena pengaruh

kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya dan gaya hidup, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Sementara itu, kemiskinan struktural merupakan suatu situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2013). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti dalam Prastyo (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar pada setiap golongan pendapatan, termasuk pada golongan penduduk miskin.

Hasil penelitian yang dilakukan Prastyo (2010), menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan koefisien regresi sebesar -0,173. Sejalan dengan Prastyo, hasil penelitian Widiastuti (2010) juga menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008 dengan koefisien regresi - 3537,125.

Berbeda dengan Prastyo dan Widiastuti, hasil penelitian Rumahorbo (2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar 0,606. Walaupun koefisien regresi ini signifikan secara statistik, namun tanda positif koefisien regresi tersebut tidak sesuai dengan harapan teoretis. Sementara itu, hasil penelitian Nur (2012) dengan menganalisis data selama periode 2005 - 2009, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar - 0,032.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terangkum dalam IPM. Alasannya karena kualitas sumber daya

manusia adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Peningkatan IPM akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa. Ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Dengan demikian secara teoretis, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terangkum dalam IPM akan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Lanjouw, dkk dalam Patta (2012), menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Hasil penelitian Nur (2012), dengan menggunakan analisis data periode 2005-2009, menunjukkan terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar -8,604.

Seseorang dapat dikatakan menganggur adalah jika dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak memperolehnya. Menurut Rahardja (2008), setidaknya ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja (*labour force approach*) dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*). Pendekatan angkatan kerja mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja membedakan angkatan kerja menjadi tiga kelompok. Pertama, menganggur (*unemployed*) yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*). Kedua, setengah menganggur (*under employed*) yaitu mereka yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh atau mereka yang bekerja dengan jam kerja yang kurang dari 35 jam per minggu. Ketiga, bekerja penuh (*employed*) yaitu mereka yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

Kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan pendapatan dan sekaligus berarti penurunan standar hidup, dapat menimbulkan peristiwa ekonomi yang paling sulit dalam hidup seseorang yang kehilangan pekerjaan tersebut bahkan juga bagi keluarganya. Ketiadaan pendapatan membuat penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang ada akhirnya akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan demikian secara teoretis, dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.

Hasil penelitian Prastyo (2010), menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan koefisien regresi 0,248, berarti bahwa setiap kenaikan satu persen tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,248 persen. Hasil penelitian Tarigan (2013) juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo dengan koefisien regresi 0,406,

berarti bahwa setiap kenaikan satu persen tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,406 persen. Penelitian Rumahorbo (2014) juga menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar 0,861. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Nur (2012) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif yang tidak signifikan dari tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar 0,059.

Banyak para ahli ekonomi yang memberikan definisi inflasi yang berbeda-beda, karena adanya hubungan yang erat dan luas antara inflasi dengan berbagai sektor perekonomian. Namun, para ekonom pada umumnya mempunyai kesatuan pandangan tentang inflasi yang menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan atau proses dimana harga-harga barang mengalami kenaikan secara umum dan berlangsung secara terus menerus (Samuelson dan Nordhaus, 2004; Rahardja dan Mandala, 2008; Mankiw, 2012; Sukirno, 2013). Berdasarkan definisi di atas, maka ada tiga kondisi yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Pertama, adanya kecenderungan harga-harga komoditas untuk meningkat sehingga menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Kedua, bahwa kenaikan harga-harga komoditas tersebut berlangsung secara terus menerus, bukan sesaat saja akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya dan biasanya perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Ketiga, kenaikan harga-harga komoditas tersebut adalah bersifat umum, artinya harga-harga komoditas tersebut berlaku secara umum bukan hanya kenaikan harga suatu komoditas saja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingginya tingkat inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Hal ini adalah karena garis kemiskinan juga ditentukan oleh harga barang dan jasa, hanya memang bobotnya berbeda, kenaikan laju inflasi serta ukuran garis kemiskinan, tidak serta-merta menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan. Sebab, angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan efektivitas beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Inflasi yang berat akan berdampak buruk terhadap distribusi pendapatan, dimana pada masa inflasi orang kaya semakin meningkat nilai kekayaannya, namun orang miskin akan semakin bertambah miskin. Dengan demikian secara teoretis, tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.

Powers (1995), dalam suatu penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan Tarigan (2013), menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo dengan koefisien regresi 0,043, berarti bahwa setiap kenaikan satu persen tingkat inflasi akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,406 persen. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan Rumahorbo (2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara tingkat inflasi dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien regresi sebesar -1,102, dimana tanda koefisien regresi ini tidak sesuai dengan harapan teoretis.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder deret waktu (*time series*) periode 2001-2015. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library study*) dengan mempelajari berbagai literatur serta berbagai tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan studi dokumenter (*documenter study*) untuk memperoleh data sekunder yang digunakan untuk menduga model penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia dan berbagai laporan-laporan yang telah dipublikasikan oleh instansi yang relevan dengan penelitian ini.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linier berganda. Adapun spesifikasi model jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dirumuskan sebagai berikut:

$$JPM_t = b_0 + b_1 TPE_t + b_2 IPM_t + b_3 TPT_t + b_4 INF_t + U \quad (t = 1, \dots, n)$$

dimana:

JPM_t = jumlah penduduk miskin yaitu jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun ke-t (ribu jiwa),

TPE_t = tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara pada tahun ke-t (%),

IPM_t = kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun ke-t (IPM),

TPT_t = tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada tahun ke-t (%),

INF_t = tingkat inflasi kumulatif di Provinsi Sumatera Utara pada tahun ke-t (%),

U = peubah pengganggu.

Secara teoretis, hipotesis dari tanda koefisien regresi dari persamaan regresi berganda di atas adalah: $b_1, b_2 < 0$ dan $b_3, b_4 > 0$.

Metode pendugaan model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pengolahan data dengan menggunakan software program SPSS (*Statistics Package for Social Science for Windows 20.0*). Metode OLS mempunyai beberapa keunggulan yaitu secara teknis sangat mudah dalam penarikan interpretasi dan perhitungan serta penaksiran BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).

Untuk menguji apakah model persamaan regresi baik digunakan sebagai alat penduga, digunakan tiga kriteria. **Pertama**, kriteria ekonometrika yaitu untuk mengetahui apakah model yang diajukan memuaskan atau tidak memuaskan, dalam arti apakah bebas atau tidak bebas dari pelanggaran asumsi model regresi linear klasik dengan melakukan dua uji: (1) uji masalah multikolinaritas (*multicollinearity*) yaitu dengan melihat nilai *collinearity statistics* (*Tolerance dan VIF*), dan (2) uji masalah otokorelasi (*autocorrelation*) dengan menggunakan uji d-statistik (uji D-W). **Kedua**, kriteria statistik digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang diajukan memuaskan atau tidak memuaskan dengan

menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji pengaruh secara individual dengan menggunakan uji-t, dan uji pengaruh secara simultan dengan menggunakan uji-F. **Ketiga**, kriteria ekonomika digunakan untuk mengetahui apakah parameter-parameter dari model persamaan regresi yang diduga bermakna atau tidak bermakna yang dapat diketahui dari apakah parameter-parameter tersebut sesuai dengan harapan teoretis atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji apakah dalam suatu model persamaan regresi terdapat korelasi atau hubungan linear yang eksak atau mendekati eksak di antara variabel bebas, dilakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan statistik kolinearitas (*collinearity statistics*) yaitu statistik *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil pengolahan program SPSS. Berdasarkan statistik tersebut, suatu variabel bebas dikatakan tidak mengalami masalah multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya apabila mempunyai nilai *tolerance* < 1 dan nilai VIF < 10 .

Dalam model persamaan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara (JPM_t) terdapat empat variabel bebas, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi (TPE_t), indeks pembangunan manusia (IPM_t), tingkat pengangguran terbuka (TPT_t), dan tingkat inflasi (INF_t). Nilai *tolerance* dan VIF dari keempat variabel tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
TPE_t	0,294	3,407	Bebas dari masalah multikolinearitas
IPM_t	0,336	2,980	Bebas dari masalah multikolinearitas
TPT_t	0,626	1,597	Bebas dari masalah multikolinearitas
INF_t	0,902	1,109	Bebas dari masalah multikolinearitas

Sumber: diolah dari data penelitian.

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* < 1 dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model persamaan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat masalah multikolinearitas sehingga berdasarkan kriteria ekonometrika model ini dapat digunakan sebagai model empirik yang baik dan mempunyai daya prediksi yang memuaskan.

Untuk menguji apakah dalam suatu model persamaan regresi terdapat masalah otokorelasi yang dikenal juga sebagai korelasi serial (*serial correlation*), digunakan statistik Durbin-Watson (Durbin Watson Test atau uji D-W atau uji d). Dalam penelitian ini banyaknya pengamatan $N = 15$ dan banyaknya variabel bebas termasuk konstanta $k = 5$ sehingga pada taraf $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai $d_L = 0,562$ dan $d_U = 2,220$, dengan demikian $4 - d_U = 1,78$ dan $4 - d_L = 3,438$. Hasil uji masalah otokorelasi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi

Model Persamaan	d- statistik	Uji Masalah Autokorelasi	Kesimpulan
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara	2,251	$d_L \leq d \leq d_U$ atau $4-d_U \leq d \leq 4-d_L$	Pengujian tidak dapat disimpulkan (<i>inconclusive</i>)

Sumber: diolah dari data penelitian.

Berdasarkan kriteria uji D-W, maka masalah otokorelasi pada model jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*). Namun demikian karena nilai d-statistik dari kedua model persamaan regresi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sekitar 2 (yaitu $d = 2,251$), maka sebagai aturan ibu jari (*rule of thumb*) dapat dianggap bahwa model tersebut tidak mengalami masalah otokorelasi baik positif maupun negatif.

Hasil pendugaan model persamaan regresi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pendugaan Model

Konstanta/ Variabel Bebas	Koefisien Regresi	t-statistik	Signifikansi
(Constant)	5987,721	3,325	0,009
TPE _t	54,978	0,790	0,450
IPM _t	-69,445	-2,510	0,033
TPT _t	49,761	2,710	0,024
INF _t	-4,128	-0,548	0,597
		F-statistik = 7,056	0,007
JPM_t = 5.987,721 + 54,978 TPE_t – 69,445 IPM_t + 49,761 TPT_t – 4,128 INF_t R² = 0,758			

Sumber: diolah dari data penelitian.

Berdasarkan kriteria statistik yaitu uji kebaikan suai (*goodness of fit*), model persamaan regresi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara adalah memuaskan, karena semua variabel bebas dalam model dapat dengan baik menjelaskan keragaman jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang cukup tinggi sebesar 0,758. Jadi sebesar 75,8 persen keragaman variabel tidak bebas (jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara) dapat dijelaskan oleh semua variabel bebas (yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi), sedangkan sisanya sebesar 24,2 persen lagi dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model persamaan regresi.

Nilai F-statistik yang tinggi sebesar 7,056 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007, menunjukkan bahwa pada taraf $\alpha = 0,01$ atau satu persen, semua variabel bebas dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Akan tetapi, berdasarkan nilai t-statistik pada taraf $\alpha = 0,05$ atau 5 persen terdapat hanya dua variabel bebas yang secara individual berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara yaitu variabel IPM dan variabel tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan hasil pendugaan model, diperoleh bahwa di Provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin (JPM_t) berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (TPE_t) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT_t). Sebaliknya, jumlah penduduk miskin (JPM_t) berhubungan negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM_t) dan tingkat inflasi (INF_t). Berdasarkan kriteria ekonomi, tanda negatif dari koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia dan tanda positif dari koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka ternyata adalah memuaskan karena sesuai dengan harapan teoretis. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera akan berkurang jika terjadi peningkatan IPM dan akan bertambah jika terjadi penurunan IPM. Kemudian, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera akan berkurang jika terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan akan bertambah jika terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka.

Tanda positif dari koefisien regresi variabel tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tanda negatif dari koefisien regresi variabel tingkat inflasi adalah tidak memuaskan karena tidak sesuai dengan harapan teoretis. Secara teoretis, perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan perubahan yang terbalik dengan perubahan jumlah penduduk miskin, dan perubahan dalam tingkat inflasi akan menimbulkan perubahan yang searah terhadap jumlah penduduk miskin. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan keadaan yang sebaliknya, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, dan peningkatan dalam tingkat inflasi akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera. Hubungan kedua variabel bebas ini terhadap variabel jumlah penduduk miskin baik secara statistik maupun secara ekonomika masih meragukan sehingga masih perlu mendapat kajian dan diskusi pada penelitian lebih lanjut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur (2012) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan variabel IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Juga sejalan dengan hasil penelitian Prastyo (2010), Tarigan (2013) dan Rumahorbo (2014) yang menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan besaran koefisien regresi variabel IPM sebesar -69,445 dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan IPM sebesar satu poin, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sekitar 69 ribu jiwa. Kemudian dari besaran koefisien regresi variabel tingkat pengangguran sebesar 49,761, dapat dikatakan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar satu persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sekitar 50 ribu jiwa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan IPM yaitu dengan memperbaiki indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan. Selain itu, penurunan jumlah penduduk miskin pada daerah penelitian dapat juga dilakukan dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui berbagai kebijakan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan menggalakkan program-program pelatihan tenaga kerja.

Dua variabel bebas lainnya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi selain tanda koefisien regresinya tidak sesuai dengan harapan teoretis, juga tidak memuaskan dari segi statistik (uji-t) yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Dari segi tanda koefisien regresi yang ditemukan dalam penelitian ini, ternyata sama dengan hasil penelitian Rumahorbo (2014) dengan analisis data selama periode 2003-2012 yang juga menemukan tanda koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang positif dan tanda koefisien regresi variabel tingkat inflasi yang negatif. Bedanya adalah bahwa Rumahorbo menemukan bahwa kedua variabel tersebut secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Prastyo (2010) dan Widiastuti (2010) yang menemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Juga berbeda dengan hasil penelitian Powers (1995) dan Tarigan (2013) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara tingkat inflasi dengan tingkat kemiskinan pada daerah penelitian mereka. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan hasil yang berbeda ini adalah karena perbedaan periode data yang dianalisis.

Kemungkinan mengapa tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara adalah karena berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah daerah selama ini lebih diarahkan kepada capaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang dapat menyentuh semua wilayah, terutama yang dapat menyentuh kehidupan penduduk pada level kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian, sungguhpun tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode 2001-2015 meningkat rata-rata 5,6 persen per tahun, namun tidak mampu menimbulkan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga juga tidak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini semakin memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa agar pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemudian mengapa tingkat inflasi tidak berpengaruh positif yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara kemungkinan adalah karena rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001-2015 hanyalah sebesar 8,41 persen per tahun (di bawah 10 persen per tahun), tergolong sebagai inflasi ringan atau inflasi moderat. Dengan demikian, laju inflasi yang tergolong rendah tersebut tidak serta-merta menaikkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Variabel tingkat pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat inflasi dapat dengan baik menjelaskan keragaman jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R^2 yang tinggi dan secara simultan semua variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditunjukkan nilai statistik F yang tinggi. Akan tetapi secara individual hanya variabel IPM dan tingkat pengangguran terbuka yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini memberi petunjuk bahwa peningkatan IPM dan penurunan tingkat pengangguran terbuka akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.
2. Koefisien regresi variabel IPM sebesar -69,445 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan IPM sebesar satu poin, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sekitar 69 ribu jiwa. Kemudian koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 49,761 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar satu persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sekitar 50 ribu jiwa.

Penelitian ini menyarankan:

1. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui peningkatan IPM (yaitu dengan memperbaiki indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan) dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui berbagai kebijakan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan menggalakkan program-program pelatihan tenaga kerja.
2. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tampaknya belum mampu menimbulkan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, maka kebijakan di bidang pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang dapat menyentuh kehidupan penduduk pada semua wilayah, baik pada level kabupaten, kecamatan maupun pedesaan. Hal ini diharapkan akan dapat menjamin semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tingkat pertumbuhan ekonomi bertanda positif dan koefisien regresi tingkat inflasi bertanda negatif, tidak sesuai dengan harapan teoretis, dan kedua variabel tersebut juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk membuktikan bagaimana sebenarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Mankiw, N. G., dkk. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara*. Tesis. Ilmu Ekonomi-S2. UNIMED. Medan. <http://digilib.unimed.ac.id/UNIMED-Master-250023/22481>. Maret 2014.
- Patta, D. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010*. URL: <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1683>. Maret 2015.
- Powers, E. T. (1995). *Growth and Poverty Revisited*. Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary.
- Prastyo, A. A. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. UNDIP. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/23026/1/skripsi_full_teks.pdf. Maret 2015.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Rahmawati, Y. I. (2006). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur*. Skripsi. Program Studi Pertanian dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Rumahorbo, R. A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. URL: <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9905>. Maret 2014.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, WD. (2004). *Ilmu Makroekonomi*. Edisi Tujuh Belas. Diterjemahkan oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Cetakan ke-22. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tarigan, D. F. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karo*. Tesis. Ilmu Ekonomi-S2. UNIMED. Medan. <http://digilib.unimed.ac.id/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-di-kabupaten-karo-33504.html>. Maret 2015.
- The World Bank. (2006). *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: The World Bank Office Jakarta.

<http://www.sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Ikhtisar-Laporan-BD-ttg-Kemiskinan-di-Indonesia.pdf>. Maret 2014.

Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.

Widiastuti, A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.